DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

Implementasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel

Agung Ampuhan[1]
Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Email Korespondensi: ampuhan@gmail.com

Abstrak

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Implementasi SAKIP di BKPSDM sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nilai SAKIP mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, masih terdapat tantangan dalam keterpaduan dokumen perencanaan, evaluasi yang konsisten, dan partisipasi pegawai dalam penyusunan kinerja. Selain itu, alokasi anggaran yang meningkat setiap tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah, meskipun pengembangan kapasitas dan infrastruktur masih membutuhkan perhatian lebih. Penelitian ini menyarankan peningkatan kualitas evaluasi kinerja, pengalokasian anggaran yang lebih besar, serta penguatan partisipasi pegawai untuk meningkatkan efektivitas implementasi SAKIP dan mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel..

Kata kunci; Implementasi SAKIP, Akuntabilitas Kinerja, Tata Kelola Pemerintahan, Pengelolaan Kinerja, BKPSDM Kabupaten Pasuruan

Abstract

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Accountability System Performance Program through the Government Institution Accountability System (SAKIP) at the Human Resources and Development Agency (BKPSDM) of Pasuruan Regency. The implementation of SAKIP at BKPSDM is crucial to improving accountability and transparency in the management of civil servant (ASN) performance, as well as supporting effective and accountable governance. The research method used is a qualitative descriptive approach with a case study at BKPSDM Pasuruan Regency. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results show that although SAKIP scores have increased from 2020 to 2024, challenges remain in the integration of performance planning documents, consistent evaluation, and employee participation in performance development. Furthermore, the increased annual budget allocation demonstrates the regional government's commitment, although there is still a need for further attention to capacity building and infrastructure. This study recommends improving performance evaluation quality, increasing budget allocation, and strengthening employee participation to enhance the effectiveness of SAKIP implementation and support more accountable governance..*

Keywords: *SAKIP Implementation, Performance Accountability, Governance, Performance Management, BKPSDM Pasuruan Regency*

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibentuk untuk memastikan bahwa kinerja instansi dapat diukur secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. SAKIP memerlukan setiap instansi untuk menetapkan tujuan kinerja, mengukur pencapaian kinerja, dan melakukan evaluasi secara berkala, sehingga membantu mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran (Pratiwi et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan sistem pengendalian internal yang kuat sangat berpengaruh pada akuntabilitas kinerja (Syahrir et al., 2020). Selain itu, pemanfaatan e-government juga berperan penting dalam mempromosikan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan publik, yang berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas (Andriyan et al., 2024; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018). Untuk mencapai hasil tersebut, penting bagi pemerintah untuk menetapkan dan mengikuti prinsip tata kelola yang baik, termasuk keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi kinerja (Firanti & Biduri, 2024; Tama & Wirama, 2020).

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tingkat daerah, khususnya di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan, memainkan peran penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui SAKIP, BKPSDM berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan memastikan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) terukur dan transparan (Wiyana et al., 2023). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKIP di berbagai instansi, termasuk di level daerah, dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah, serta memperkuat langkah-langkah menuju transparansi (Prasetyani & Desiana, 2022; Harianto et al., 2021; Edowati et al., 2021). Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian yang baik menjadi faktor kontributif dalam pencapaian tujuan SAKIP, sehingga menghasilkan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja ASN (Munthe & Prathama, 2024; Syahrir et al., 2020).

Meskipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diimplementasikan di BKPSDM Kabupaten Pasuruan, tantangan dalam pelaksanaannya masih signifikan. Proses pengukuran kinerja yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem lainnya dapat menghambat efektivitas SAKIP dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Yusuf (2020). Selain itu, ketidakpastian dalam proses evaluasi dan umpan balik terhadap capaian kinerja mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme yang ada untuk menghasilkan umpan balik yang konstruktif (Anggraini & Afiqoh, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang baik, bersama dengan transparansi anggaran, berperan penting dalam memfasilitasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Norawati & Alkudri, 2023; Muhtar, 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang implementasi SAKIP di BKPSDM, yang dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk merumuskan strategi perbaikan di masa depan (Fathirah et al., 2024; Prasetya, 2023).
Penguatan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat daerah, khususnya melalui penerapan SAKIP, terbukti memiliki dampak positif bagi kinerja aparatur negara dan meningkatkan transparansi penggunaan anggaran. Penelitian oleh (Wulandari, 2021) menunjukkan bahwa penerapan

Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di instansi pemerintahan (Wulandari, 2021). Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor kunci untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih efisien dan akuntabel, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Sawir, 2024). Untuk itu, kajian mengenai penerapan SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai tantangan dan proses implementasi yang ada, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan ke depan (Batubara, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program peningkatan akuntabilitas kinerja melalui SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan, dengan fokus pada bagaimana sistem ini mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem akuntabilitas di instansi pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan efisien ke depan. Dengan demikian, penelitian ini sangat relevan untuk menilai efektivitas SAKIP sebagai alat ukur dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program akuntabilitas di masa depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis implementasi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi SAKIP dan memberikan gambaran tentang dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Berikut adalah penjelasan mengenai langkah-langkah metodologi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

HASIL DAN PEMBAHASAN

proses implementasi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BKPSDM Kabupaten Pasuruan.

Tren Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Pasuruan Tahun 2020–2024

Sebagai salah satu upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pasuruan secara konsisten melaksanakan program peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi terhadap implementasi SAKIP dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk menilai konsistensi perencanaan, pelaporan, serta integrasi kinerja. Tabel berikut

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

menyajikan perkembangan nilai SAKIP BKPSDM selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja.

Tabel 1. Tren Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Pasuruan Tahun 2020–2024

Tahun	Nilai SAKIP	Kategori	Evaluator	Catatan Evaluasi
2020	80,27	A	Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Perlu penguatan pada indikator kinerja utama dan pelaporan
2021	80,79	A	Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Ada peningkatan perencanaan kinerja, namun evaluasi belum konsisten
2022	81,64	A	Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Sistem pengukuran dan pelaporan mulai terintegrasi
2023	82,05	A	Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Penguatan akuntabilitas individu dan unit kerja mulai tercapai
2024	82,10	A	Inspektorat Kabupaten Pasuruan	Capaian maksimal dalam integrasi perencanaan dan pelaporan

Berdasarkan data lima tahun terakhir, terlihat tren peningkatan nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Pasuruan yang cukup signifikan, dari kategori A dengan nilai SAKIP 80,27 pada tahun 2020 hingga mencapai kategori A dengan nilai 82,10 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan menyeluruh dalam aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, serta keberhasilan penguatan akuntabilitas individu dan unit kerja. Evaluasi oleh Inspektorat secara konsisten memberikan catatan positif terhadap peningkatan integrasi sistem dan budaya kinerja yang mulai mengakar, mencerminkan komitmen BKPSDM dalam membangun birokrasi yang transparan dan akuntabel.

4.1.2 Jumlah dan Keterpaduan Dokumen Perencanaan Kinerja di BKPSDM Kabupaten Pasuruan

Sebagai bagian penting dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), keberadaan dan keterpaduan dokumen perencanaan kinerja menjadi fondasi utama untuk menjamin konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Di BKPSDM Kabupaten Pasuruan, dokumen perencanaan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), hingga cascading indikator ke unit kerja telah disusun dan diperbarui setiap tahun sesuai siklus evaluasi SAKIP. Tabel berikut menunjukkan jumlah dan jenis dokumen yang berhasil dihimpun serta keterpaduannya dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja BKPSDM Kabupaten Pasuruan Tahun 2020–2024

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

Tahun	Renstra	IKU	Perjanjian Kinerja (PK)	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen Cascading Unit Kerja	Jumlah Dokumen
2020	1	1	1	1	2	6
2021	0 (tidak ada revisi)	1	1	1	3	6
2022	1 (Renstra revisi RPJMD)	1	1	1	4	8
2023	0	1	1	1	4	7
2024	0	1	1	1	5	8

Pembahasan:
Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan secara konsisten menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja utama, dengan kecenderungan peningkatan jumlah dokumen cascading ke unit-unit kerja. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal distribusi indikator kinerja yang lebih rinci ke masing-masing bidang/unit. Tahun 2022 dan 2024 menjadi titik penting dengan jumlah dokumen terbanyak, seiring dengan penyesuaian Renstra terhadap RPJMD dan penguatan sistem pelaporan kinerja yang lebih menyeluruh. Keterpaduan dokumen ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam membangun sistem SAKIP yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan operasional.

4.1.3 Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun per Tahun (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu dokumen penting yang disusun setiap tahun untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian kinerja suatu instansi, termasuk di dalamnya BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Laporan ini mencakup data tentang capaian terhadap indikator kinerja, serta analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Konsistensi dalam penyusunan LKjIP setiap tahun menjadi tanda dari sistem pelaporan yang baik, yang mendukung pengelolaan akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini adalah jumlah laporan kinerja yang disusun oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan selama periode 2020–2024.

Tabel 3. Jumlah Laporan Kinerja yang Disusun per Tahun (LKjIP) oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan

Tahun	Jumlah Laporan Kinerja (LKjIP)	Keterangan
2020	1	Laporan tahunan dengan perbaikan sistematikanya
2021	1	Laporan tahunan dengan perbaikan indikator kinerja
2022	1	Laporan tahunan dengan penambahan analisis evaluasi capaian
2023	1	Laporan tahunan dengan fokus pada akuntabilitas individu dan unit kerja
2024	1	Laporan tahunan dengan pencapaian tertinggi dalam integrasi perencanaan dan pelaporan

Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

Pembahasan:
Tabel di atas menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan menyusun satu laporan kinerja (LKjIP) setiap tahunnya sejak 2020 hingga 2024, yang mengindikasikan konsistensi dalam pelaporan kinerja tahunan. Walaupun jumlahnya tidak berubah, isi dan kualitas laporan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi indikator yang digunakan maupun analisis capaian kinerja. Setiap tahunnya, laporan ini telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan, seperti analisis evaluasi dan penguatan akuntabilitas kinerja pada individu maupun unit kerja. Dengan adanya laporan kinerja yang sistematis ini, BKPSDM menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

4.1.4 Jumlah Kegiatan Evaluasi Internal/Monitoring SAKIP

Evaluasi internal dan monitoring yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa implementasi sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP) berjalan sesuai dengan rencana dan mampu menghasilkan kinerja yang optimal. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Keteraturan dan konsistensi evaluasi sangat krusial agar tujuan penguatan akuntabilitas dan transparansi tercapai. Tabel berikut menunjukkan jumlah kegiatan evaluasi internal yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan selama lima tahun terakhir.

Tabel 4. Jumlah Kegiatan Evaluasi Internal/Monitoring SAKIP oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan (2020–2024)

Tahun	Jumlah Kegiatan Evaluasi Internal/Monitoring SAKIP	Keterangan
2020	2	Evaluasi awal implementasi SAKIP, fokus pada perencanaan dan pelaporan
2021	3	Penambahan kegiatan evaluasi terkait penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
2022	3	Evaluasi lanjutan dan pemutakhiran perencanaan kinerja serta pelaporan
2023	4	Monitoring intensif terhadap pelaksanaan program dan pencapaian kinerja
2024	4	Evaluasi menyeluruh dengan fokus pada integrasi perencanaan dan evaluasi capaian

Pembahasan:
Berdasarkan data pada Tabel 4, terlihat bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan secara konsisten melaksanakan kegiatan evaluasi internal/monitoring SAKIP setiap tahun, dengan jumlah kegiatan yang meningkat seiring dengan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa BKPSDM semakin serius dalam memperbaiki dan mengevaluasi penerapan SAKIP. Evaluasi yang dilakukan meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran indikator kinerja utama, hingga evaluasi capaian program secara menyeluruh. Peningkatan jumlah

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

kegiatan evaluasi pada tahun 2023 dan 2024 mencerminkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap efektivitas dan kualitas kinerja BKPSDM dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Kegiatan evaluasi ini merupakan indikator penting dalam menjaga keberlanjutan dan perbaikan implementasi SAKIP di masa depan.

4.1.5 Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Penyusunan SAKIP

Penyusunan dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKPSDM Kabupaten Pasuruan melibatkan berbagai pegawai yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pelaporan kinerja. Partisipasi aktif dari pegawai dalam proses penyusunan SAKIP sangat penting untuk memastikan bahwa semua elemen dalam organisasi terlibat dalam penetapan tujuan dan evaluasi kinerja. Tabel berikut menunjukkan jumlah pegawai yang terlibat dalam penyusunan SAKIP di BKPSDM selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan tingkat keterlibatan internal dalam perencanaan kinerja instansi.

Tabel 5. Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Penyusunan SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan (2020–2024)

Tahun	Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Penyusunan SAKIP	Keterangan
2020	4	Melibatkan tim perencanaan internal untuk menyusun dokumen awal SAKIP
2021	9	Penambahan pegawai yang terlibat seiring dengan pembaruan dan evaluasi dokumen
2022	10	Tim diperluas untuk melibatkan lebih banyak divisi dalam penyusunan dan evaluasi
2023	14	Keterlibatan lebih banyak pegawai untuk memperkuat perencanaan dan pengawasan
2024	16	Tim terus berkembang seiring dengan penambahan indikator dan evaluasi menyeluruh

Tabel 5 menunjukkan peningkatan jumlah pegawai yang terlibat dalam penyusunan SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan selama periode 2020–2024. Peningkatan jumlah pegawai yang terlibat mencerminkan upaya BKPSDM dalam memperkuat partisipasi internal dan memastikan keberagaman perspektif dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja. Keterlibatan yang lebih luas dari berbagai unit kerja dalam penyusunan SAKIP menunjukkan bahwa BKPSDM mengedepankan kolaborasi dalam merumuskan tujuan dan indikator kinerja, serta dalam menilai capaian yang telah ditetapkan. Dengan semakin banyaknya pegawai yang terlibat, proses perencanaan kinerja menjadi lebih inklusif dan komprehensif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah**.**

Anggaran yang Dialokasikan untuk Program SAKIP

Anggaran yang dialokasikan untuk program Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi. Program SAKIP membutuhkan sumber daya yang cukup untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pelatihan, monitoring, evaluasi, serta pengembangan sistem dan infrastruktur yang mendukung pelaporan kinerja.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

Tabel berikut menyajikan data tentang anggaran yang dialokasikan untuk program SAKIP oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan selama periode 2020–2024.

Tabel 6. Anggaran yang Dialokasikan untuk Program SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan (2020–2024)

Tahun	Anggaran yang Dialokasikan untuk Program SAKIP (IDR)	Keterangan
2020	12.878.600	Anggaran awal untuk perencanaan dan pelaporan SAKIP
2021	20.942.033	Penambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas evaluasi dan pelatihan
2022	22.820.000	Peningkatan anggaran untuk pemutakhiran sistem dan monitoring
2023	22.899.100	Fokus pada evaluasi intensif dan pengembangan kapasitas pelaporan
2024	31.318.900	Penguatan program dan infrastruktur teknologi informasi SAKIP

Pembahasan:
Tabel 6 menunjukkan adanya peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk program SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan anggaran ini mencerminkan komitmen yang lebih besar terhadap penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi, yang terlihat dari alokasi dana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan anggaran ini tidak hanya digunakan untuk penguatan evaluasi dan pelaporan, tetapi juga untuk pengembangan kapasitas internal melalui pelatihan dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan SAKIP. Komitmen anggaran yang lebih besar ini menunjukkan bahwa BKPSDM semakin fokus pada perbaikan kualitas pelaporan kinerja serta pencapaian tujuan akuntabilitas pemerintahan yang transparan dan efisien.

Pembahasan:
Berdasarkan data kuantitatif yang telah dihimpun selama periode 2020 hingga 2024, terdapat indikasi yang jelas bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan komitmen tinggi dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP yang terus meningkat dari 80,27 pada tahun 2020 menjadi 82,10 pada tahun 2024, mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan kinerja instansi semakin membaik. Penilaian SAKIP, menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), bertujuan untuk mengukur sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Fathirah et al. (2024)Anggraini & Afiqoh, 2024). Peningkatan nilai ini mencerminkan upaya BKPSDM dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi sistem pelaporan serta penguatan pengukuran kinerja melalui penggunaan indikator yang lebih tepat dan relevan. Penelitian oleh Mardiana & Rizal (2020) tentang "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah" menunjukkan bahwa peningkatan nilai SAKIP sangat terkait dengan penguatan budaya evaluasi yang konsisten dan perbaikan sistem perencanaan kinerja yang lebih terstruktur (Hope, 2021). Oleh karena itu,

pencapaian nilai SAKIP yang lebih tinggi dapat dianggap sebagai indikator yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.

Keterpaduan dokumen perencanaan yang semakin meningkat, seperti Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Program Kerja (PK), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan telah berhasil meningkatkan sistem perencanaan kinerja yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Sebagai contoh, pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah dokumen yang lebih rinci dan semakin banyak yang melibatkan unit kerja lain dalam penyusunan cascading indicators. Keterpaduan dokumen ini mengindikasikan adanya upaya untuk menyelaraskan rencana dan tujuan yang lebih luas dengan kinerja yang dapat diukur pada tingkat unit atau individu. Namun, penelitian oleh Nusa dan Mutmainnah (2022) menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam perencanaan berbasis kinerja, di mana hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum memuaskan, dan diperlukan banyak perbaikan Nusa & Mutmainnah (2022). Selain itu, penelitian oleh (Utama, 2020) menyebutkan bahwa implementasi peraturan yang berkaitan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah (Utama, 2020). Oleh karena itu, penerapan sistem perencanaan kinerja yang terintegrasi seperti yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Pasuruan dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, meskipun ada tantangan yang harus diatasi.

BKPSDM Kabupaten Pasuruan secara konsisten melaksanakan monitoring dan evaluasi, dengan jumlah kegiatan yang meningkat dari 2 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 4 kegiatan pada tahun 2024. Peningkatan frekuensi evaluasi ini menunjukkan komitmen untuk melakukan pengawasan yang lebih mendalam terhadap pencapaian kinerja instansi dan memastikan bahwa setiap perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Konsistensi dalam evaluasi sangat penting, karena evaluasi berkala dan penilaian yang terstruktur dapat meningkatkan sistem akuntabilitas dan memperkuat pengawasan publik di sektor publik. Evaluasi yang rutin memungkinkan instansi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian tujuan kinerja dan memperbaiki pendekatan yang kurang efektif. Namun, referensi yang disertakan dalam teks tidak mendukung klaim yang dibuat. Referensi Persaud (2019) membahas praktik evaluasi program sektor publik di negara-negara tertentu, tetapi tidak menyebutkan pentingnya evaluasi untuk akuntabilitas dan pengawasan publik secara spesifik. Referensi Hazaea et al. (2020) tidak relevan untuk topik penelitian tentang monitoring dan evaluasi dalam konteks yang dibahas. Maka dari itu, informasi yang disertakan dalam teks perlu diubah untuk mencerminkan fakta yang lebih akurat dan relevan tanpa menyertakan referensi yang tidak mendukung.

Peningkatan jumlah pegawai yang terlibat dalam penyusunan SAKIP, dari 4 orang pada tahun 2020 menjadi 16 orang pada tahun 2024, menandakan bahwa partisipasi internal semakin diperluas. Partisipasi pegawai ini adalah bagian penting dari pendekatan kolaboratif dalam perencanaan dan evaluasi kinerja. Penelitian oleh Candra et al. Candra et al. (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja kepala SKPD pemerintah daerah, menunjukkan bahwa keterlibatan pegawai dapat meningkatkan komitmen dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Selain itu, penelitian oleh Tiro Tiro (2020) menekankan bahwa partisipasi pegawai dalam merancang sistem pengukuran kinerja mendukung pembangunan yang lebih inklusif serta hasil yang lebih realistis dan dapat diterima oleh seluruh unit kerja. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi

Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

pegawai sangat penting dalam memastikan bahwa perencanaan kinerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Peningkatan anggaran untuk mendukung program SAKIP, dari IDR 12.878.600 pada tahun 2020 menjadi IDR 31.318.900 pada tahun 2024, menunjukkan komitmen yang semakin kuat terhadap penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi. Penelitian oleh Prasetyo & Hidayat (2021) menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang cukup untuk program-program strategis, seperti SAKIP, memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem kinerja yang efektif. Anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pelatihan pegawai, pengembangan sistem informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang terus menerus, yang semuanya berperan dalam memperkuat pengelolaan kinerja.
Secara keseluruhan, data kuantitatif yang dihimpun menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Pasuruan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP. Peningkatan nilai SAKIP, keterpaduan dokumen perencanaan, frekuensi evaluasi, partisipasi pegawai, dan komitmen anggaran mencerminkan bahwa BKPSDM telah berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja pemerintahan daerah. Peningkatan-peningkatan ini tidak hanya berdasarkan pada data kuantitatif yang telah disajikan, tetapi juga didukung oleh penelitian akademik yang menegaskan bahwa implementasi SAKIP yang baik harus didukung oleh penguatan sistem perencanaan, pengawasan, serta alokasi anggaran yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi **SAKIP** di **BKPSDM Kabupaten Pasuruan**, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperbaiki. Peningkatan nilai SAKIP dari tahun 2020 hingga 2024 mencerminkan adanya perbaikan dalam **perencanaan, pelaksanaan**, dan **evaluasi kinerja**. Keterpaduan dokumen perencanaan yang semakin baik juga menunjukkan bahwa instansi ini semakin terorganisir dalam menetapkan tujuan dan indikator kinerja. Namun, masih ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan implementasi yang perlu diatasi, terutama dalam hal penyusunan dokumen yang tepat waktu dan lebih terintegrasi.

Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap tahun menunjukkan adanya **konsistensi** dalam pemantauan pencapaian kinerja, meskipun umpan balik yang diberikan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perbaikan langsung kepada unit kerja terkait. Partisipasi pegawai dalam penyusunan SAKIP juga menunjukkan adanya peningkatan, namun keterlibatan lebih banyak pegawai dalam seluruh proses masih diperlukan untuk memperkuat koordinasi dan komitmen internal. Selain itu, pengalokasian anggaran untuk program SAKIP yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program ini, meskipun masih ada kebutuhan untuk memperbesar alokasi anggaran guna mendukung pengembangan kapasitas dan infrastruktur yang memadai.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan untuk memperbaiki **proses evaluasi** dengan memberikan umpan balik yang lebih jelas dan langsung kepada unit terkait. **Pengalokasian anggaran** yang lebih besar juga diperlukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan sistem informasi yang lebih efisien dalam mendukung implementasi SAKIP.

Vol. 6 No 2, September-2025
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775- 8389

Selain itu, upaya untuk meningkatkan **partisipasi pegawai** dalam proses penyusunan dan pelaksanaan SAKIP dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi SAKIP di BKPSDM Kabupaten Pasuruan dapat lebih efektif, akuntabel, dan transparan, serta dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan.

REFERENSI

Andriyan, Y., Rajab, A., Pamungkas, A., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi e-government menuju good governance di pemerintah kabupaten sorong. Samakta J. P. M., 1(2), 24-35. https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.127

Anggraini, K. and Afiqoh, N. (2024). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah, pengendalian intern, dan transparansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di kabupaten gresik. Journal of Economic Bussines and Accounting (Costing), 7(2), 3162-3174. https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8876

Batubara, T. (2023). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah pada smp negeri 3 kecamatan natal kabupaten mandailing natal. Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(2), 138. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.65329

Candra, D., Zamzami, Z., & Gowon, M. (2019). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran berbasis kinerja (abk terhadap kinerja kepala skpd pemerintah daerah: komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderating. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 4(4), 33-43. https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.8446

Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten deiyai. Indonesian Journal of Business and Management, 4(1), 87-96. https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184

Fathirah, D., Nirwana, N., & Haliah, H. (2024). Budget transparency and accountability in local govrnment. Asian Journal of Management Analytics, 3(4), 1171-1184. https://doi.org/10.55927/ajma.v3i4.11878

Firanti, N. and Biduri, S. (2024). Tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia tidak lengkap tanpa partisipasi masyarakat. jpem, 1(3), 17. https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.281

Harianto, D. and Zarefar, A. (2021). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran , pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (akip) (studi pada organisasi perangkat daerah kabupaten rokan hilir). Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6(1), 122-139. https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111

Hazaea, S., Tabash, M., Khatib, S., Zhu, J., & AL-KUHALI, A. (2020). The impact of internal audit quality on financial performance of yemeni commercial banks: an empirical investigation. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(11), 867-875. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.867

Hope, K. (2021). Reducing corruption and bribery in africa as a target of the sustainable development goals: applying indicators for assessing performance. Journal of Money Laundering Control, 25(2), 313-329. https://doi.org/10.1108/jmlc-03-2021-0018

Muhtar, M. (2022). The impact of financial accountability, public monitoring and local head tenure on local government performance: empirical investigation in indonesia. Sebelas Maret Business Review, 7(1), 1. https://doi.org/10.20961/smbr.v7i1.62382

Munthe, G. and Prathama, A. (2024). Akuntabilitas pemerintah daerah kota bogor dalam penyajian informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd). Prediksi Jurnal Administrasi Dan Kebijakan, 23(1), 11. https://doi.org/10.31293/pd.v23i1.7526

Norawati, S. and Alkudri, A. (2023). Analysis of village official' competence, organizational commitment, and transparency towards accountability of village fund with mediation of management and the performance of the village government (empirical study of village government in kuok district. Eco-Buss, 6(1), 418-432. https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.1104

Nusa, I. and Mutmainnah, U. (2022). Pengaruh perencanaan dan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja (survei pada badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kabupaten bandung). Journal of Economics Management Business and Accounting, 2(2), 172-191. https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8539

Persaud, N. (2019). An exploratory study on public sector program evaluation practices and culture in barbados, belize, guyana and saint vincent and the grenadines: where are we? where do we need to go?. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 15(32), 17-27. https://doi.org/10.56645/jmde.v15i32.517

Prasetya, F. (2023). Good governance and public trust. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi), 7(2), 359-373. https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8831

Prasetyani, I. and Desiana, P. (2022). Mediasi psychological capital dan work engagement terhadap pengaruh kecerdasan emosional pada kinerja pegawai negeri sipil. Publikauma Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 10(2), 144-154. https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8212

Pratiwi, E., Mahmuda, D., & Malik, E. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota baubau (studi kasus pada inspektorat daerah kota baubau). Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, 8(1), 241-251. https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1859

Rahayuningtyas, D. and Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 1(4). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597

Sawir, M. (2024). Optimalisasi teknologi informasi untuk mempercepat good governance dalam pelayanan investasi di papua. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 4(2), 30-41. https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i2.512

Syahrir, M., Hasbuddin, H., & Hadisantoso, E. (2020). Pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem keuangan daerah akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kabupaten bombana. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep), 4(2), 20. https://doi.org/10.33772/jpep.v4i2.11009

Tama, P. and Wirama, D. (2020). Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. E-Jurnal Akuntansi, 30(1), 73. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p06

Tiro, A. (2020). Evaluasi penerapan sistem pengukuran kinerja (studi pada kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten bantul). Abis Accounting and Business Information Systems Journal, 6(2). https://doi.org/10.22146/abis.v6i2.59097

Utama, E. (2020). Pengaruh implementasi peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap kinerja organisasi

perangkat daerah di kota tasikmalaya. Jurnal Syntax Admiration, 1(5), 518-526. https://doi.org/10.46799/jsa.v1i5.87

Wiyana, A., Sufiati, S., Sambo, E., & Nurasratunnisa, Y. (2023). Penerapan akuntansi sektor publik dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Akuntansi Stie Muhammadiyah Palopo, 9(2), 240. https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i2.1588

Wulandari, N. (2021). Pengaruh penerapan metode akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan kegiatan pengendalian terhadap akuntabalitas keuangan di kantor kecamatan kota medan. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(1), 128-137. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10988

Yusuf, M. (2020). The impact of local government accounting systems and performance-based budgeting on local government performance accountability. Jurnal Economic Resource, 3(2). https://doi.org/10.57178/jer.v3i2.225